Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Aksi Strategis untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkayang

Ringkasan Eksekutif

Laporan strategis ini dirancang sebagai panduan operasional bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkayang untuk mengakselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mencapai nilai tertinggi dalam evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebuah penghargaan nasional yang mengukur komitmen dan keberhasilan pembangunan berkeadilan gender. Pencapaian APE dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sebuah sistem pembangunan desa yang secara fundamental telah inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warganya.

Analisis mendalam terhadap formulir penilaian APE menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada substansi program, tetapi juga pada kapasitas administrasi untuk mendokumentasikan setiap tahapan secara sistematis. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan berfokus pada penguatan peran DPMD sebagai fasilitator utama dalam membangun kapasitas pemerintah desa, baik secara substantif maupun administratif.

Strategi ini bertumpu pada tiga pilar aksi utama yang saling terkait:

- 1. Pelembagaan PUG di Tingkat Desa:** Membangun fondasi hukum dan kelembagaan yang kokoh melalui fasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) responsif gender, pembentukan dan pelatihan Kader PUG Desa, serta pengembangan sistem pendataan terpilah yang sederhana dan aplikatif. Pilar ini bertujuan untuk mentransformasi PUG dari wacana menjadi kebijakan formal di tingkat desa.
- 2. Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan Desa:** Mengintervensi titik-titik kritis dalam siklus perencanaan dan penganggaran desa. Ini dilakukan dengan mereformasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar lebih inklusif, menyediakan katalog kegiatan responsif gender yang dapat didanai oleh Dana Desa, serta membangun mekanisme pemantauan dan pelaporan yang terstruktur.
- 3. Eskalasi Program Unggulan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA):** Memposisikan D/KRPPA sebagai program payung yang implementasinya secara sinergis dapat memenuhi berbagai indikator penilaian APE. Strategi ini mencakup revitalisasi peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai motor penggerak utama dan mendorong keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang diuraikan dalam laporan ini, DPMD Kabupaten Bengkayang tidak hanya akan mampu meningkatkan skor APE secara signifikan, tetapi juga akan meletakkan dasar bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Pendahuluan: Menjadikan Anugerah Parahita Ekapraya sebagai Peta Jalan Pembangunan Inklusif di Bengkayang

Analisis Signifikansi APE

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan instrumen penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di tingkat daerah. Namun, memandang APE hanya sebagai sebuah trofi atau predikat adalah sebuah kekeliruan strategis. Esensinya, APE, melalui formulir penilaiannya yang komprehensif, menyediakan sebuah kerangka kerja (framework) yang terstruktur dan terukur untuk melakukan audit internal dan memandu arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Formulir penilaian APE secara detail membedah tujuh prasyarat pelembagaan PUG, mulai dari komitmen politik dalam bentuk regulasi, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, data terpilah, hingga partisipasi masyarakat. Dengan demikian, formulir ini dapat dan seharusnya diposisikan bukan sebagai beban administratif tahunan, melainkan sebagai peta jalan strategis (

strategic roadmap) yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area prioritas intervensi dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Posisi Strategis Dinas PMD

Dalam konteks pencapaian APE, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memegang posisi yang unik dan sentral. Jika Pemerintah Kabupaten adalah "otak" dari kebijakan PUG, maka DPMD adalah "jantung dan pembuluh darah" yang memompa kebijakan tersebut hingga ke sel-sel terkecil pemerintahan, yaitu desa. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerjanya, DPMD memiliki mandat langsung untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, memfasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LKD) seperti PKK dan Karang Taruna, serta mengelola program-program pemberdayaan masyarakat secara umum.

Kewenangan ini menjadikan DPMD sebagai aktor paling vital dan efektif untuk menerjemahkan kebijakan PUG tingkat kabupaten—yang seringkali bersifat makro dan abstrak—ke dalam aksi-aksi nyata di tingkat akar rumput. DPMD adalah satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki akses dan pengaruh langsung terhadap siklus perencanaan (Musrenbangdes), penganggaran (APBDes), dan pelaksanaan pembangunan di seluruh desa di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, keberhasilan Kabupaten

Bengkayang dalam meraih APE sangat bergantung pada kemampuan DPMD dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pembina, dan akselerator PUG di tingkat desa.

Tujuan dan Struktur Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan utama untuk menyediakan panduan aksi yang terperinci, sistematis, dan operasional bagi DPMD Kabupaten Bengkayang. Dokumen ini dirancang untuk dapat diadopsi secara langsung ke dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) DPMD. Strukturnya dirancang untuk mengikuti alur logis, dimulai dari pemahaman mendalam terhadap kerangka penilaian APE, pembangunan fondasi kelembagaan di desa, integrasi PUG ke dalam siklus pembangunan, hingga eskalasi program unggulan yang berdampak luas. Setiap rekomendasi yang disajikan didasarkan pada analisis mendalam terhadap formulir penilaian APE dan disesuaikan dengan konteks kewenangan serta kapasitas DPMD.

Bagian 1: Membedah Kerangka Penilaian APE: Identifikasi Indikator Kunci dan Peluang Peningkatan Nilai

Untuk merancang strategi yang efektif, langkah pertama adalah membedah dan memahami secara mendalam struktur dan logika di balik formulir penilaian APE. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang memiliki bobot strategis tinggi dan peluang untuk peningkatan nilai yang signifikan melalui intervensi DPMD.

Dekonstruksi Komponen Penilaian APE

Formulir penilaian APE yang komprehensif dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain utama yang saling terkait dan relevan dengan lingkup kerja DPMD :

1. **Prasyarat Kelembagaan (Institutional Readiness):** Domain ini adalah fondasi dari seluruh upaya PUG. Tanpa pemenuhan prasyarat ini, program-program PUG akan berjalan secara sporadis dan tidak berkelanjutan. Variabel kunci dalam domain ini meliputi:
 - **Regulasi/Kebijakan:** Adanya landasan hukum yang kuat, mulai dari Peraturan Daerah (Perda) hingga Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang secara eksplisit mengatur implementasi PUG.
 - **SDM dan Internalisasi PUG:** Ketersediaan aparatur yang terlatih PUG di berbagai fungsi (perencana, pelaksana, evaluator), serta adanya mekanisme internalisasi seperti Pokja PUG, *Focal Point*, dan *Gender Champions*.
 - **Data Terpilah:** Ketersediaan data berdasarkan jenis kelamin yang menjadi dasar bagi analisis, perencanaan, dan evaluasi yang responsif gender.
2. **Proses Pembangunan (Development Cycle Integration):** Domain ini mengukur sejauh mana perspektif gender telah terintegrasi ke dalam tujuh proses inti pembangunan. Ini adalah ujian sesungguhnya dari PUG, yaitu apakah PUG hanya menjadi program tambahan atau telah menjadi cara berpikir (*mainstream*) dalam setiap tahapan pembangunan. Variabel kunci meliputi:

- **Perencanaan Responsif Gender:** Integrasi analisis gender ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
 - **Anggaran Responsif Gender (ARG):** Alokasi anggaran yang secara spesifik ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender, yang dibuktikan melalui dokumen seperti *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*.
 - **Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:** Adanya mekanisme untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dapat diukur dan dilaporkan secara berkala.
3. **Hasil dan Dampak (Outcome & Impact):** Domain ini menilai hasil nyata dari implementasi PUG di masyarakat. Ini adalah muara dari seluruh proses kelembagaan dan pembangunan. Variabel kunci meliputi:
- **Program Unggulan:** Keberadaan dan efektivitas program spesifik seperti pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan, dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).
 - **Peningkatan Indeks Gender:** Perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
 - **Sarana dan Prasarana Responsif Gender:** Ketersediaan fasilitas publik yang mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya, seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak.

Analisis Indikator Kunci dan "Quick Wins"

Tidak semua indikator memiliki bobot strategis yang sama. Beberapa indikator berfungsi sebagai "gerbang" yang jika berhasil dibuka, akan mempermudah pemenuhan indikator lainnya. Sebaliknya, kegagalan pada indikator kunci ini akan menciptakan efek domino negatif.

Salah satu temuan krusial dari analisis formulir APE adalah penekanannya yang sangat kuat pada **bukti administratif**. Setiap klaim keberhasilan program harus didukung oleh dokumen formal seperti Surat Keputusan (SK), laporan kegiatan yang terstruktur (lengkap dengan daftar hadir, notulensi, dan dokumentasi foto), serta peraturan yang sah. Hal ini membawa pada sebuah kesimpulan penting: APE bukan hanya menguji substansi PUG, tetapi juga menguji

kapasitas dan ketertiban administrasi pemerintahan. Sebuah program PUG yang sangat baik namun tidak terdokumentasi dengan rapi akan bernilai nol di mata evaluator. Implikasinya bagi DPMD sangat jelas: tugas pembinaan kepada desa tidak hanya mencakup "apa yang harus dilakukan" tetapi juga "bagaimana cara mendokumentasikannya" sesuai standar penilaian.

Lebih jauh, terdapat sinergi yang kuat antar indikator. Indikator **Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)** adalah contoh paling menonjol. D/KRPPA bukanlah sekadar satu dari sekian banyak program yang bisa dipilih. Jika dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif, program ini dapat berfungsi sebagai "wadah" atau "program payung"

yang secara otomatis berkontribusi pada pemenuhan puluhan variabel penilaian lainnya. Sebagai contoh, implementasi 10 indikator D/KRPPA akan menuntut adanya:

- **Peraturan Desa (Perdes) tentang D/KRPPA**, yang memenuhi indikator regulasi.
- **Pengorganisasian perempuan dan anak**, yang memenuhi indikator partisipasi masyarakat.
- **Penyusunan data terpilah**, yang memenuhi indikator ketersediaan data.
- **Alokasi anggaran desa**, yang memenuhi indikator ARG.

Dengan demikian, memfokuskan sumber daya DPMD untuk menyukseskan D/KRPPA di sebanyak mungkin desa adalah strategi yang sangat efisien untuk mendongkrak skor APE secara signifikan.

Korelasi Kewenangan Dinas PMD dengan Variabel Penilaian APE

Pemetaan antara tugas dan fungsi DPMD, sebagaimana diatur dalam peraturan bupati yang relevan, dengan variabel-variabel penilaian APE menunjukkan adanya keselarasan yang kuat. DPMD secara inheren memiliki mandat untuk mengerjakan sebagian besar dari apa yang dituntut dalam penilaian, khususnya pada level desa.

- **Tusi "Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"** berkorelasi langsung dengan indikator **"Regulasi/Kebijakan"**, di mana DPMD dapat memfasilitasi penyusunan Perdes yang responsif gender.
- **Tusi "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa"** berkorelasi dengan indikator **"SDM terlatih PUG"**, di mana DPMD dapat menyelenggarakan pelatihan PUG bagi perangkat desa.
- **Tusi "Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa"** berkorelasi dengan indikator **"Perencanaan Responsif Gender"**, melalui intervensi dalam proses Musrenbangdes.
- **Tusi "Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa"** berkorelasi dengan indikator

"Partisipasi Masyarakat", terutama melalui penguatan peran PKK.

Pemetaan ini menegaskan bahwa upaya DPMD untuk meningkatkan skor APE bukanlah tugas tambahan di luar kewenangan, melainkan merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya dengan perspektif yang lebih tajam dan terarah pada keadilan gender.

Bagian 2: Membangun Fondasi Kelembagaan PUG yang Kokoh di Tingkat Desa

Untuk memastikan implementasi PUG yang berkelanjutan dan terukur, DPMD harus memprioritaskan pembangunan fondasi kelembagaan yang kuat di tingkat desa. Fondasi ini terdiri dari tiga pilar utama: regulasi yang melegitimasi, sumber daya manusia yang menggerakkan, dan data yang mengarahkan.

Strategi Fasilitasi Regulasi Desa Responsif Gender

Setiap tindakan pemerintah, termasuk pemerintah desa, memerlukan dasar hukum yang jelas, terutama jika berkaitan dengan alokasi anggaran. Kepala desa seringkali ragu menggunakan Dana Desa untuk program-program "non-fisik" seperti pemberdayaan perempuan atau pelatihan kesadaran gender jika tidak ada payung hukum yang eksplisit di tingkat desa. Tanpa adanya regulasi ini, semua upaya untuk mendorong Anggaran Responsif Gender (ARG) di tingkat desa akan terhenti pada level wacana. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling krusial adalah memberikan legitimasi hukum bagi PUG di dalam tata kelola desa.

Aksi Strategis DPMD: DPMD harus mengambil inisiatif untuk merancang, menyusun, dan menyosialisasikan **template atau draf model Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Desa yang Responsif Gender**. Template ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi pemerintah desa dan BPD dalam menyusun regulasi mereka sendiri. Mengacu pada Permendesa PD TT Nomor 21 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya perencanaan partisipatif, Perdes ini akan secara resmi memasukkan PUG sebagai salah satu kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, usulan-usulan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kegiatan responsif gender lainnya akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk dibahas dalam Musrenbangdes dan dialokasikan dalam APBDes. DPMD dapat menggunakan contoh-contoh Perdes yang sudah ada dari daerah lain sebagai referensi untuk mempercepat proses penyusunan template ini.

Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG Desa

Regulasi hanyalah dokumen statis tanpa adanya aktor-aktor yang memahami, mengawal, dan melaksanakannya. Penilaian APE sangat menekankan pentingnya ketersediaan SDM yang terlatih PUG. Pelatihan yang hanya menasar aparat di tingkat kabupaten terbukti tidak efektif dan tidak berkelanjutan. DPMD perlu membangun "infrastruktur manusia" PUG langsung di setiap desa.

Aksi Strategis DPMD:

1. **Menciptakan Kader PUG Desa:** DPMD perlu merancang dan menyelenggarakan program "**Pelatihan dan Sertifikasi Kader PUG Desa**". Program ini tidak hanya ditujukan bagi perangkat desa, tetapi harus melibatkan representasi dari berbagai elemen masyarakat, terutama Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, tokoh perempuan, dan perwakilan kelompok rentan. Materi pelatihan harus praktis dan mencakup: konsep dasar gender, teknik fasilitasi Musrenbangdes inklusif, cara melakukan analisis gender sederhana (misalnya, adaptasi dari GAP), dan metode pendataan terpilah. Kader-kader inilah yang akan menjadi "penjaga api" PUG di desa, memastikan keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
2. **Mengaktifkan Pokja PUG Desa:** Mendorong setiap desa untuk membentuk **Kelompok Kerja (Pokja) PUG Desa** yang dilegalkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Pokja ini, yang idealnya beranggotakan para Kader PUG yang telah dilatih, bertugas untuk mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan

implementasi PUG di desa, serupa dengan fungsi Pokja PUG di tingkat kabupaten. DPMD berperan dalam menyediakan panduan kerja (standar operasional prosedur) bagi Pokja dan memfasilitasi forum komunikasi antar-Pokja PUG desa secara berkala untuk berbagi pengalaman dan praktik baik.

Membangun Sistem Data Terpilah Berbasis Desa

Prinsip dasar PUG adalah pembangunan yang didasarkan pada data dan analisis, bukan asumsi. Tanpa data terpilah berdasarkan jenis kelamin, mustahil untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan, akar masalahnya, dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Formulir APE secara eksplisit menuntut ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah. Mengharapkan desa untuk secara mandiri membangun sistem data yang kompleks adalah tidak realistis. Oleh karena itu, DPMD harus memfasilitasi proses ini.

Aksi Strategis DPMD: DPMD perlu mengembangkan **instrumen dan format pendataan terpilah sederhana berbasis desa**. Format ini dapat berupa formulir cetak atau spreadsheet sederhana yang mudah diisi oleh Kader PUG atau perangkat desa. Data yang dikumpulkan harus fokus pada informasi yang relevan untuk perencanaan desa, seperti:

- **Demografi:** Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, dan status perkawinan.
- **Partisipasi:** Jumlah peserta laki-laki dan perempuan dalam Musrenbangdes, pelatihan, dan kegiatan desa lainnya.
- **Penerima Manfaat:** Jumlah laki-laki dan perempuan yang menerima manfaat dari program desa (misalnya, bantuan UMKM, program ketahanan pangan).
- **Kesehatan dan Sosial:** Data dasar tentang angka kematian ibu, angka perkawinan anak, dan kasus kekerasan yang dilaporkan.

Data ini, meskipun sederhana, akan menjadi fondasi bagi desa untuk mulai melakukan **analisis gender** dalam dokumen perencanaan mereka, sebuah syarat mutlak untuk mendapatkan nilai pada indikator perencanaan dan penganggaran responsif gender. DPMD bertugas mengompilasi data ini dari seluruh desa untuk memberikan gambaran PUG di tingkat kabupaten.

Bagian 3: Panduan Praktis Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan Desa

Setelah fondasi kelembagaan terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan perspektif gender terintegrasi secara sistematis ke dalam setiap tahapan siklus pembangunan desa. Titik intervensi paling kritis adalah pada tahap perencanaan (Musrenbangdes), karena apa yang tidak direncanakan tidak akan pernah dianggarkan dan dilaksanakan.

Tahap Perencanaan: Mentransformasi Musrenbangdes menjadi Forum Partisipatif dan Inklusif

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah gerbang utama bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Namun, tanpa intervensi yang disengaja, forum ini seringkali didominasi oleh elite desa dan suara laki-laki, sementara kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya terabaikan. Mengubah Musrenbangdes menjadi forum yang benar-benar inklusif adalah prasyarat mutlak untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang responsif gender.

Aksi Strategis DPMD: DPMD harus menerbitkan dan mendiseminasikan **Panduan Teknis Penyelenggaraan Musrenbangdes Inklusif** kepada seluruh desa. Panduan ini harus bersifat praktis dan mudah diterapkan, dengan mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Isi panduan tersebut harus mencakup:

1. **Tahap Pra-Musrenbangdes:** Mewajibkan pemerintah desa, difasilitasi oleh Kader PUG Desa, untuk menyelenggarakan **rembuk atau musyawarah khusus** dengan kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan. Ini termasuk rembuk dengan kelompok perempuan (misalnya melalui PKK atau kelompok tani wanita), kelompok pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi spesifik mereka sebelum Musrenbangdes utama dilaksanakan, sehingga mereka datang ke forum dengan usulan yang sudah matang.
2. **Tahap Pelaksanaan Musrenbangdes:** Memberikan panduan teknik fasilitasi yang memastikan inklusivitas. Contohnya, mengatur waktu pelaksanaan yang memungkinkan perempuan untuk hadir (tidak pada malam hari atau saat jam kerja di ladang), menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan secara aktif memberikan kesempatan berbicara kepada perwakilan perempuan dan kelompok rentan.
3. **Pengenalan Analisis Gender Sederhana:** Memperkenalkan penggunaan alat analisis gender yang disederhanakan, seperti adaptasi dari **Gender Analysis Pathway (GAP)**. Kader PUG Desa dilatih untuk memandu diskusi singkat yang menjawab empat pertanyaan kunci untuk setiap usulan pembangunan: (a) Siapa yang akan mendapatkan

akses?, (b) Siapa yang akan **berpartisipasi?**, (c) Siapa yang akan memiliki **kontrol?**, dan (d) Siapa yang akan menerima **manfaat** terbesar?. Proses ini membantu seluruh peserta untuk mulai berpikir kritis tentang dampak gender dari setiap usulan.

Tahap Penganggaran: Optimalisasi Dana Desa untuk Program Responsif Gender

Pemerintah desa seringkali mengalami kebingungan dalam menerjemahkan konsep "responsif gender" yang abstrak menjadi butir-butir kegiatan yang konkret dan dapat dianggarkan dalam APBDes. Menyediakan contoh-contoh praktis akan jauh lebih efektif

daripada sosialisasi teoretis. Ini akan mengubah PUG dari sebuah ideologi menjadi sebuah daftar program yang bisa dipilih dan didanai.

Aksi Strategis DPMD: DPMD perlu menyusun dan mendistribusikan "**Katalog Inspirasi Kegiatan Responsif Gender yang Dapat Dibiayai Dana Desa**". Katalog ini berfungsi sebagai "menu" yang dapat dipilih oleh desa sesuai dengan konteks dan prioritas lokal mereka. Mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa, contoh-contoh kegiatan yang dapat dimasukkan dalam katalog antara lain:

- **Bidang Pemberdayaan Ekonomi:**
 - Pelatihan keterampilan spesifik bagi perempuan kepala keluarga (misalnya, pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, pemasaran digital).
 - Pemberian bantuan modal awal atau peralatan untuk kelompok usaha perempuan.
 - Pembangunan lumbung pangan desa yang dikelola oleh kelompok perempuan.
- **Bidang Kesehatan:**
 - Penyelenggaraan kelas ibu hamil dan kelas ayah siaga.
 - Pembentukan dan operasionalisasi Posyandu Remaja untuk edukasi kesehatan reproduksi.
 - Program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil dengan melibatkan produk pangan lokal.
- **Bidang Pendidikan dan Sosial:**
 - Sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
 - Penyediaan fasilitas ramah anak di ruang publik desa (misalnya, sudut baca, area bermain di kantor desa atau pasar desa).
 - Pemberian beasiswa atau bantuan perlengkapan sekolah bagi anak perempuan dari keluarga miskin.

Dengan menyediakan katalog ini, DPMD secara langsung membantu desa dalam memenuhi indikator APE terkait "**Anggaran Responsif Gender**" dan

"Output yang mendukung pemberdayaan perempuan".

Tahap Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan

Sebagaimana telah diidentifikasi, dokumentasi adalah elemen krusial dalam penilaian APE. Program yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dapat dibuktikan pelaksanaannya dan dilaporkan dampaknya. DPMD harus membangun sebuah sistem yang memudahkan desa dalam melakukan hal ini.

Aksi Strategis DPMD: Mengembangkan sebuah **Sistem Pelaporan PUG Desa (SIP-PUG Desa)** yang sederhana namun komprehensif. Sistem ini bisa berupa format laporan standar (misalnya, dalam bentuk Excel atau formulir Google) yang wajib diisi dan dikirimkan oleh setiap desa kepada DPMD secara berkala (misalnya, setiap semester). Laporan ini harus mencakup:

- Daftar kegiatan PUG yang telah dilaksanakan.
- Jumlah anggaran yang terserap.
- Data penerima manfaat terpilah (jumlah laki-laki dan perempuan).
- Dokumentasi pendukung (foto kegiatan, daftar hadir).
- Catatan singkat tentang tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai.

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring bagi DPMD, tetapi juga secara proaktif membangun bank data dan bukti dukung yang akan sangat vital saat pengisian formulir evaluasi APE, khususnya pada bagian **Pemantauan dan Evaluasi**.

Bagian 4: Menginisiasi Program Unggulan DPMD: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan inisiatif strategis dari Kemen PPPA yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak secara holistik ke dalam tata kelola desa. Bagi DPMD, memposisikan D/KRPPA sebagai program unggulan adalah sebuah langkah cerdas. Implementasinya yang komprehensif dapat menjadi katalisator yang memenuhi berbagai indikator APE secara simultan, menjadikannya investasi program yang sangat efisien.

Panduan Implementasi Sepuluh Indikator Wajib D/KRPPA

Keberhasilan D/KRPPA diukur melalui pemenuhan 10 indikator kunci. Tugas DPMD adalah menerjemahkan indikator-indikator ini menjadi langkah-langkah yang dapat dieksekusi oleh pemerintah desa.

Aksi Strategis DPMD: DPMD perlu mengembangkan dan menyebarluaskan "**Buku Saku Implementasi 10 Indikator D/KRPPA**" yang ditujukan bagi Kepala Desa, BPD, dan Kader PUG Desa. Buku saku ini harus memecah setiap indikator menjadi aksi-aksi praktis:

1. **Pengorganisasian Perempuan dan Anak:** Panduan membentuk Forum Anak Desa dan mengaktifkan kelompok perempuan.
2. **Data Terpilah:** Menyediakan format pendataan yang telah dijelaskan di Bagian 2.
3. **Perdes tentang D/KRPPA:** Menyediakan template Perdes yang siap diadaptasi oleh desa.
4. **Pembiayaan Responsif:** Panduan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan D/KRPPA, merujuk pada "Katalog Inspirasi" di Bagian 3.
5. **Keterwakilan Perempuan:** Strategi mendorong partisipasi perempuan dalam BPD dan lembaga desa lainnya.
6. **Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan:** Menghubungkan desa dengan program dari dinas teknis terkait (Koperasi & UKM, Perindustrian, Perdagangan) dan memfasilitasi pelatihan.
7. **Pengasuhan Berbasis Hak Anak:** Panduan menyelenggarakan kelas parenting, membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
8. **Penurunan Kekerasan:** Panduan membentuk unit layanan pengaduan sederhana di desa dan mekanisme rujukan ke UPTD PPA.

9. **Penurunan Pekerja Anak:** Panduan sosialisasi dan pendataan pekerja anak untuk dilaporkan ke dinas terkait.
10. **Pencegahan Perkawinan Anak:** Panduan kampanye, sosialisasi, dan kerjasama dengan KUA dan tokoh agama.

Sinergi D/KRPPA dengan Institusi Desa

Implementasi D/KRPPA tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Program ini harus diintegrasikan ke dalam struktur dan lembaga yang sudah ada di desa untuk memastikan keberlanjutannya.

Aksi Strategis DPMD:

1. **Merevitalisasi Peran PKK sebagai Motor Utama D/KRPPA:** Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah "aset tidur" yang potensinya sangat besar. Strukturnya yang mengakar hingga tingkat dasawisma dan 10 Program Pokoknya sangat selaras dengan tujuan PUG dan D/KRPPA. DPMD harus secara strategis "menitipkan" pelaksanaan banyak indikator D/KRPPA kepada Tim Penggerak PKK. Ini dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus kepada kader PKK, memberikan mandat yang jelas melalui SK Kepala Desa, dan memastikan program kerja PKK didukung oleh alokasi anggaran dari APBDes. Langkah ini akan mentransformasi PKK dari organisasi yang seringkali dianggap seremonial menjadi agen pembangunan yang efektif, terukur, dan menjadi tulang punggung D/KRPPA.
2. **Mendorong Keterwakilan Perempuan di BPD:** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan APBDes. Kehadiran perempuan di BPD sangat krusial untuk memastikan RKPDes dan APBDes yang telah disepakati benar-benar responsif gender dan program D/KRPPA berjalan sebagaimana mestinya. DPMD perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di BPD, mengatasi berbagai faktor penghambat seperti rendahnya kepercayaan diri atau kurangnya dukungan politik. DPMD dapat menyelenggarakan program "Pendidikan Politik bagi Calon Anggota BPD Perempuan" menjelang pemilihan anggota BPD.

Dengan membingkai D/KRPPA bukan hanya sebagai program pemenuhan hak, tetapi juga sebagai investasi sosial untuk pencegahan masalah-masalah krusial di masa depan (seperti stunting, kekerasan, dan kemiskinan), DPMD dapat membangun dukungan politik yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kabupaten.

Bagian 5: Rencana Aksi Terperinci dan Rekomendasi Prioritas untuk Dinas PMD Bengkayang

Bagian ini menyajikan matriks rencana aksi strategis yang merangkum seluruh rekomendasi ke dalam sebuah format operasional. Matriks ini dirancang untuk menjadi alat kerja utama bagi DPMD dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau upaya percepatan PUG di tingkat desa guna meraih Anugrah Parahita Ekapraya.

Matriks Rencana Aksi Strategis

Tabel berikut menguraikan secara rinci setiap langkah yang perlu diambil oleh DPMD, menghubungkan langsung setiap indikator APE dengan program spesifik, target yang terukur, aktor pelaksana di desa, bukti dukung yang harus disiapkan, serta linimasa pelaksanaan.

Tabel 1: Matriks Rencana Aksi Strategis DPMD untuk Peningkatan Skor APE

No.	Indikator APE & Variabel Kunci	Program/ Kegiatan Strategis DPMD	Target/Output	Aktor Pelaksana di Desa	Bukti Dukung yang Dihasilkan	Linimasa	Catatan/Kejelasan
A	PELEMBAGAAN PUG (FONDASI)						
1.	1.1 Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Desa Responsif Gender dan/atau Perdes D/KRPPA	Minimal 50% desa memiliki Perdes PUG/D/KRPPA dalam 2 tahun.	Pemerintah Desa, BPD	Dokumen Perdes yang telah diundangkan di setiap desa.	Tahun 1-2	DPMD menyediakan template Perdes dan bantuan teknis melalui Tenaga Pendamping Profesional (TPP).
2.	2.1 SDM Terlatih PUG	Program Pelatihan dan Sertifikasi "Kader PUG Desa".	Terbentuknya minimal 3 Kader PUG terlatih di setiap desa.	Perangkat Desa, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat	Sertifikat Pelatihan, Daftar nama Kader PUG per desa, Laporan Pelatihan (materi, foto, daftar hadir).	Setiap Tahun (Kuartal 2)	Anggaran pelatihan dialokasikan dalam DPA DPMD.
3.	2.3 Focal Point PUG & 2.7 Pokja PUG	Mendorong Pembentukan Pokja	100% desa memiliki Pokja PUG	Kepala Desa, Kader PUG Desa	SK Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja	Tahun 1	DPMD menyediakan panduan kerja

		PUG Desa melalui SK Kepala Desa.	yang aktif.		PUG Desa, Laporan kegiatan/n otulensi rapat Pokja.		(SOP) untuk Pokja PUG Desa.
4.	3.1 & 3.3 Data Terpilah	Pengembangan dan Implementasi Sistem Pendataan Terpilah Sederhana Berbasis Desa.	100% desa mengumpulkan dan melaporkan data terpilah dasar setiap semester.	Kader PUG Desa, Perangkat Desa (Kaur Perencanaan)	Kompilasi data terpilah tingkat desa dan kabupaten, Profil Desa yang memuat data terpilah.	Setiap Semester	DPMD mengembangkan format Excel/Google Form sederhana untuk pendataan.
B	INTEGRASI DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DESA						
5.	II.a.2.1 Analisis Gender dalam Dokumen Perencanaan	Penerbitan dan Sosialisasi "Panduan Teknis Musrenbangdes Inklusif dan Partisipatif".	75% desa melaksanakan Pra-Musrenbang khusus perempuan dan kelompok rentan.	Pemerintah Desa, BPD, Kader PUG Desa	Notulensi dan dokumentasi Pra-Musrenbang, Daftar usulan dari kelompok perempuan/rentan.	Setiap Tahun (Sebelum Musrenbangdes)	TPP wajib mendampingi proses Pra-Musrenbang.
6.	II.b.2.1 Kegiatan/ Sub-kegiatan Responsif Gender	Penyusunan dan Diseminasi "Katalog Inspirasi Kegiatan PUG yang Didanai Dana Desa".	Adopsi minimal 2 kegiatan dari katalog oleh setiap desa dalam RKPDes.	Pemerintah Desa, Tim Penyusun RKPDes	Dokumen RKPDes dan APBDes yang memuat kegiatan responsif gender.	Setiap Tahun (Saat Penyusunan RKPDes)	DPMD berkoordinasi dengan dinas teknis untuk memperkaya isi katalog.
7.	II.d.1.2 & II.e.1.2 Pemantauan &	Pengembangan dan Implementasi	90% desa menyam-paikan	Pokja PUG Desa,	Laporan PUG semesteran dari	Setiap Semester	DPMD membuat dashboard sederhana

	Evaluasi PUG	ntasi Sistem Pelaporan PUG Desa (SIP-PUG Desa) secara berkala.	laporan PUG semesteran secara tepat waktu.	Sekretaris Desa	desa, Laporan kompilasi dan analisis PUG tingkat kabupaten .		untuk memvisualisasikan data laporan.
C	HASIL DAN DAMPAK (PROGRAM UNGGULAN)						
8	III.13 Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	Program Akselerasi Pembentukan dan Pembinaan D/KRPPA .	Terbentuknya minimal 1 D/KRPPA percontohan di setiap kecamatan dalam 2 tahun.	Seluruh Aktor Desa (dipimpin oleh Pokja PUG dan PKK)	SK Kepala Desa tentang Penetapan D/KRPPA, Laporan pemenuhan 10 indikator D/KRPPA.	Tahun 1-2	DPMD menyelenggarakan kompetisi dan memberikan penghargaan bagi D/KRPPA terbaik.
9	III.6.2 Partisipasi Masyarakat & III.1.b Keterlibatan Masyarakat	Revitalisasi Peran PKK sebagai Motor Penggerak D/KRPPA dan PUG.	Program Kerja Tahunan PKK di 80% desa selaras dengan indikator D/KRPPA.	Tim Penggerak PKK Desa	Dokumen Program Kerja PKK, Laporan kegiatan PKK yang mendukung PUG/D/KRPPA.	Setiap Tahun	DPMD bekerja sama dengan TP-PKK Kabupaten untuk menyusun panduan penyesuaian program.
10	III.10.4 Persentase Kepala Desa Perempuan & Keterwakilan Perempuan di BPD	Program Pendidikan Politik dan Kepemimpinan bagi Perempuan Desa.	Peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades	Kelompok Perempuan, Kader PUG Desa	Laporan kegiatan pendidikan politik, Data jumlah calon dan anggota BPD perempuan.	Menjelang Pilkades/Pemilihan BPD	Berkolaborasi dengan Kesbangpol dan organisasi masyarakat sipil.

			dan BPD.				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

Rekomendasi Kebijakan Internal DPMD

Untuk memastikan rencana aksi di atas berjalan efektif, diperlukan dukungan kebijakan internal di dalam DPMD sendiri:

1. **Pembentukan Tim Internal PUG:** Kepala DPMD perlu membentuk Tim Kerja atau *Focal Point* PUG internal melalui Surat Keputusan. Tim ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi seluruh program PUG yang difasilitasi oleh dinas.
2. **Alokasi Anggaran Pembinaan:** DPMD harus secara eksplisit mengalokasikan anggaran dalam DPA-nya untuk kegiatan pembinaan PUG di desa, seperti biaya pelatihan Kader PUG, pencetakan panduan dan katalog, serta penyelenggaraan rapat koordinasi.
3. **PUG sebagai Indikator Kinerja TPP:** Capaian implementasi PUG di desa binaan (misalnya, jumlah desa yang memiliki Perdes PUG, jumlah desa yang melaksanakan Musrenbangdes inklusif) harus dijadikan salah satu Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Hal ini akan memberikan insentif dan mendorong TPP untuk lebih proaktif dalam mengawal PUG di lapangan.

Strategi Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor

DPMD tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan PUG memerlukan kerja sama dan sinergi lintas Perangkat Daerah. DPMD harus mengambil peran proaktif dalam mengoordinasikan upaya di tingkat desa dengan kebijakan di tingkat kabupaten:

- **Dengan Bappeda:** Berkoordinasi untuk memastikan bahwa data dan usulan PUG dari desa (hasil kompilasi SIP-PUG Desa) dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten.
- **Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB):** Sebagai *leading sector* PUG di kabupaten, DPMD harus bersinergi erat dengan DP3AKB. DPMD fokus pada implementasi di tingkat desa, sementara DP3AKB memberikan dukungan substantif, data makro, dan kebijakan umum.
- **Dengan Dinas Kesehatan:** Berkolaborasi dalam program-program yang relevan dengan D/KRPPA, seperti penurunan stunting, kesehatan ibu dan anak, dan pembinaan Posyandu.
- **Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:** Bekerja sama dalam isu pencegahan perkawinan anak dan memastikan anak perempuan mendapatkan akses pendidikan yang setara.
- **Dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan:** Menjalin kemitraan untuk mendukung program kewirausahaan perempuan di desa.

Penutup

Meraih predikat tertinggi dalam Anugerah Parahita Ekapraya adalah sebuah target yang ambisius, namun sangat mungkin dicapai oleh Kabupaten Bengkayang apabila terdapat komitmen yang kuat dan strategi yang tepat. Laporan ini telah menguraikan sebuah peta jalan yang komprehensif dan operasional, yang menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai aktor sentral dalam mengakselerasi implementasi Pengarusutamaan Gender di tingkat desa.

Kunci keberhasilan terletak pada pergeseran paradigma: dari PUG sebagai program tambahan menjadi PUG sebagai cara kerja fundamental dalam seluruh siklus pembangunan desa. Tiga pilar utama—pelebagaan, integrasi, dan eskalasi program unggulan—harus dijalankan secara simultan dan konsisten. Fasilitasi regulasi di tingkat desa akan membuka gerbang penganggaran, pembentukan kader PUG akan memastikan keberlanjutan, dan transformasi Musrenbangdes akan menjamin perencanaan yang inklusif. Lebih dari itu, dengan memposisikan D/KRPPA sebagai program payung dan merevitalisasi peran PKK, DPMD dapat menciptakan dampak yang luas dengan sumber daya yang efisien.

Implementasi rencana aksi yang tertuang dalam laporan ini tidak hanya akan meningkatkan skor APE secara signifikan, tetapi yang lebih penting, akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan perempuan, anak, dan seluruh masyarakat di desa-desa Kabupaten Bengkayang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang (*no one left behind*), membangun fondasi masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera.